

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah dengan orang yang memang bertanggung jawab atau berpengalaman dibidangnya. Sebuah indikator keberhasilan roda pemerintahan tidak lepas dari peran orang-orang yang berada dilingkungan pemerintahan tersebut. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun, tidak jarang dalam sebuah pemerintahan yang menjalankan mayoritas laki-laki.

Sebuah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering menjadikan perempuan sebagai makhluk kedua. Kejadian seperti inilah yang mengakar dengan istilah patriarkhi. Menurut Alfian Rokhmansyah (2016:32) patriarkhi merupakan sebuah struktur yang memposisikan peran laki-laki sebagai orang yang berada diatas dengan segala-galanya. Dengan kata lain laki-laki mempunyai kontrol utama dalam kehidupan masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki pengaruh sedikit saja bahkan bisa dikatakan tidak memiliki hak pada bagian tertentu dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Ketidaksetaraan tersebut antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan individu dalam tatana masyarakat memiliki akses yang berbeda. Menurut Walby dalam Utami dkk (2018:63) patriarki dibagi menjadi dua bagian, yakni privat dan publik. Patriarkhi privat menjadikan perempuan sebagai arena produksi rumah tangga dan sebagai arena utama untuk penindasan terhadap perempuan. Sedangkan patriarki publik yaitu merupakan penguasaan pada arena publik seperti pekerjaan dan negara. Menurut Darwin dalam Utami (2018:64) patriarki merupakan sebuah variasi ideologi hegemoni. Artinya penguasaan terhadap satu kelompok ke kelompok lainnya diterima dengan sukarela.

Seperti yang sudah kita ketahui Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan sistem patriarki. Sehingga budaya tersebut sangat berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan perempuan. Sistem patriarki ini

sudah tanamkan sejak waktu yang sangat lama sehingga sudah menjadi suatu tatanan sosial dalam masyarakat. Budaya atau ideologi tersebut merupakan suatu yang hegemonik atau menimbulkan subordinasi pada perempuan (Abdullah, 2007:84).

Berlakunya budaya patriarki yang hingga saat ini masih dianut oleh masyarakat Indonesia lebih khususnya dalam masyarakat pedesaan, sehingga kaum perempuan tidak nyaman dengan posisi berada pada kelas dua. Nilai-nilai patriarki yang sudah tersirat dalam masyarakat Indonesia yang memposisikan perempuan sebagai makhluk feminim dan emosional. Namun, berbeda dengan laki-laki yang dianggap sebagai makhluk yang maskulin dan rasional. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan peran dalam masyarakat. Sebagai salah satu contohnya dalam hal pekerjaan, laki-laki yang memang notabennya sebagai orang yang kuat atau maskulin lebih banyak mendapatkan posisi dalam sektor publik, sedangkan perempuan yang notabennya lemah lebih banyak dalam sektor domestik.

Sejak masa lampau, budaya masyarakat Indonesia telah menempatkan laki-laki pada hirarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Hal ini bisa kita lihat yang memimpin bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan yakni laki-laki yang sangat mendominasi sedangkan perempuan yang pernah menjabat sebagai presiden yakni satu orang. Selain itu dapat kita lihat dalam kabinet-kabinet yang pernah ada di Indonesia diisi oleh laki-laki. Sebagai salah satu contoh pada masa orde baru yakni kabinet pembangunan I sampai VII yang dipimpin oleh Soeharto. Kabinet-kabinet tersebut hanya diisi oleh laki-laki (setkab.go.id/profil-kabinet/). Begitupun dengan kabinet selanjutnya masih banyak ruang untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan tidak banyak atau bahkan tidak ada. Maka hal ini menandakan bahwa patriarki sudah sejak lama membudaya di Indonesia.

Hal ini juga terlihat dalam masyarakat Hindu yakni pada zaman Vedic 1500 SM, dimana perempuan tidak mendapat warisan dari suami atau keluarga yang sudah meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM perempuan harus menikah sebelum masa pubertas, sehingga menyebabkan perempuan tidak mendapatkan pendidikan dan semakin

meningkatnya angka buta huruf. Menurut hukum agama Yahudi, perempuan dianggap sebagai inferior, najis dan sumber polusi. Dengan demikian perempuan sangat dilarang untuk menghadiri acara upacara keagamaan.

Menguatnya budaya patriarki pada birokrasi dan pemerintahan Indonesia sehingga pemilihan semakin bias gender. Maka ketika tanpa melihat antar golongan dan jabatan, maka keikutsertaan perempuan dalam birokrasi dan pemerintahan berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Negara (2018) mencapai 39,70 % sedangkan laki-laki sebesar 60,30 %. Namun, posisi perempuan dalam Birokrasi dan pemerintahan khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya menempati posisi atau jabatan eselon III dan IV, Namun laki-laki banyak yang menempati posisi atau jabatan eselon I dan II yang memegang jabatannya lebih tinggi.

Hal serupa terjadi dalam masyarakat Dungkek khususnya dalam Aparatur Pemerintah Desa Dungkek. Sejak awal terbentuknya pemerintahan yang dipimpin oleh Limbang sampai saat ini masih menjadi hal yang lumrah dimana pekerja dalam pemerintahan tersebut masih banyak seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ranah pemerintahan masih sangat minim bagi masyarakat desa Dungkek. Hal tersebut yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Perempuan di Desa Dungkek masih tergantung oleh laki-laki baik dalam sektor ekonomi, politik, bahkan dalam ranah publik.

Ketidakaktifan perempuan di Desa Dungkek dalam ranah publik disebabkan oleh adanya budaya patriarki dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perempuan selalu dipandang sebagai makhluk nomor dua dalam ranah publik atau pemerintahan. Hal ini terbukti dengan adanya Aparatur Pemerintah Desa Dungkek yang mayoritas laki-laki.

Tabel 1.1

Data Kades dan Perangkat Desa Dungkek - Kec. Dungkek tahun 2020

NO	Nama	Jabatan
	Kades/Perangkat	
1	Ach. Jumahri	Kepala Desa
2	Imam Santoso	Sekretaris Desa
3	Mohammad Wardi	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Tsulusiyatul Munawarah	Kaur Keuangan
5	Samsuri	Kaur Perencanaan dan Program
6	Sahrudi	Kasi Pemerintahan
7	Busaeri	Kasi Kesejahteraan
8	Fendi Sulaiman	Kasi Pelayanan
9	Moh. Sahi	Kadus Panjurangan
10	Molyadi	Kadus So'ongan
11	Ismail	Kadus Dungkek Laok
12	Ilyas	Kadus Dungkek Daja Timur
13	A.Busahwi	Kadus Dungkek Daja Barat
14	Moh. Zabib Habibullah	Operator Desa

Sumber: Data Pemdes 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi Aparatur Pemerintah Desa Dungkek 99% diisi oleh laki-laki. Hal ini

menunjukkan bahwa laki-laki yang menjadi penguasa dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Penempatan perempuan sebagai bendahara terkait dengan stereotip dan anggapan bahwa perempuan lebih teliti, cermat, dan hemat dalam sehingga cocok menjadi bendahara. Sebaliknya, perempuan sangat jarang ditempatkan pada posisi pengambil kebijakan karena perempuan dinilai emosional, lemah dan sering tidak logis. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam agar bisa diketahui kenapa kebiasaan tersebut masih terjadi yakni hegemoni budaya patriarki dalam masyarakat Desa Dungkek, khususnya dalam pemilihan Aparatur Pemerintah Desa Dungkek.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana hegemoni budaya patriarkhi dalam pemilihan Aparatur Desa Dungkek?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hegemoni budaya patriarkhi dalam pemilihan Aparatur Desa Dungkek.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Peneliti diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang hegemoni budaya patriarki dalam pemerintahan
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Memiliki gambaran tentang hegemoni budaya patriarkhi dalam pemilihan Aparatur Desa Dungkek.

b. Bagi Masyarakat

Mengetahui penyebab hegemoni budaya patriarkhi dalam pemilihan Aparatur Desa Dungkek.